PRINSIP KEPEMIMPINAN, ETIKA POLITIK, DAN DIPLOMASI KARAENG PATTINGALLOANG DALAM SISTEM PEMERINTAHAN KERAJAAN GOWA-TALLO

Muh Redha[1], Nur Shabrina Raharja[2]
Universitas Islam Negeri Alauddin

Email: muhredha123@gmail.com, shabrinan21@gmail.com

Abstract

This study discusses the leadership principles, political ethics, and diplomacy of Karaeng Pattingalloang ini the governmental system of the Gowa-Tallo Kingdom during the seventeenth century. The purpose of this study is to understand the leadership principles, political values, and diplomatic strategies implemented by Karaeng Pattingalloang in governing the kingdom. The research uses the historical method with a qualitative library research approach through the stages of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The primary source of this research is the manuscript Lontarak Patturioloang ri Tattalloka, supported by various related literatures. The findings show that Karaeng Pattingalloang applied leadership that combined local cultural values, Islamic teachings, and openness to scientific development. In politics, he emphasized justice, deliberation, and the interests of the kingdom above personal interests. In diplomacy, he succeeded in making Makassar an international trading center through open relations with various nations without sacrificing the sovereignty of the kingdom. This study indicates that the leardship values and political ethics of Karaeng Pattingalloang remain relevant in the present era, particularly in fostering fair, transparent leadership that focues on public interest. In addition, this research is expected to enrich local historical studies and provide lessons on the importance of diplomacy and tolerance.

Keywords: *Karaeng Pattingalloang, leadership, political ethics, diplomacy, Gowa-Tallo.*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang prinsip kepemimpinan, etika politik, dan diplomasi Karaeng Pattingalloang dalam sistem pemerintahan Kerajaan Gowa-Tallo pada abad ke-17. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami prinsip kepemimpinan, nilai etika politik, dan strategi diplomasi yang diterapkan Karaeng Pattingalloang dalam menjalankan pemerintahan kerajaan. Metode yang digunakan adalah penelitian sejarah (*library research*) dengan pendekatan kualitatif melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber utama penelitian ini berasal dari manuskrip *Lontarak Patturioloang ri Tallalloka* yang didukung oleh berbagai literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Karaeng Pattingalloang menerapkan kepemimpinan yang memadukan nilai budaya lokal, ajaran Islam, dan keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan. Dalam bidang politik, ia mengedepankan prinsip keadilan, musyawarah, dan kepentingan kerajaan. Dalam bidang diplomasi, ia berhasil menjadikan Makassar sebagai pusat perdagangan internasional melalui hubungan terbuka dengan berbagai bangsa tanpa mengorbankan kedaulatan kerajaa. Penelitian ini menegaskan peran Karaeng Pattingalloang sebagai

pemimpin, diplomat, dan intelektual penting dalam perkembangan Kerajaan Gowa-Tallo. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai kepemimpinan dan etika politik Karaeng Pattingalloang masih relevan saat ini dalam membentuk kepemimpinan yang adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya kajian sejarah lokal serta menekankan pentingnya diplomasi dan toleransi.
Kata kunci: Karaeng Pattingalloang, kepemimpinan, etika politik, diplomasi, Gowa-Tallo.

Pendahuluan

Kerajaan Gowa-Tallo dikenal sebagai salah satu kerajaan maritim yang memiliki pengaruh besar di Nusantara pada abad ke-17, khususnya dalam aktitivitas perdagangan internasional di kawasan timur Indonesia. Perkembangan kerajaan ini ditinjaun oleh sistem pemerintahan yang kokoh serta kebijakan politik dan ekonomi yang mampu menarik perhatian para pedagang dari berbagai wilayah Asia dan Eropa.[1] Salah satu tokoh penting di balik kemajuan tersebut adalah Karaeng Pattingalloang yang menjabat sebagai Raja Tallo sekaligus Mangkubumi Kerajaan Gowa-Tallo pada masa pemerintahan Sultan Malikussaid. Dalam berbagai sumber sejarah, Karaeng Pattingalloang digambarkan sebagai seorang negarawan, diplomat, dan intelektual yang memiliki wawasan luas serta sikap terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.[2] Kontribusinya dalam bidang pemerintahan, perdagangan, dan hubungan internasional menjadikan dirinya sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia pada abad ke-17.[3]

Salah satu sumber penting yang membahas pemerintahan Kerajaan Tallo adalah *Lontrak Patturioloang ri Tutalloka* karya A, Kadril Manyambeng dan Abd. Rahim Mone. Naskah tersebut memuat informasi mengenai praktik kepemimpinan, etika politik, serta hubungan diplomatik yang dijalankan dalam pemerintahan Kerajaan Tallo.[4] Melalui sumber tersebut, Karaeng Pattingalloang tidak hanya dipahami sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai tokoh intelektual yang memiliki kemampuan diplomatik dalam menghadapi dinamika hubungan antarbangsa pada masanya.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji Karaeng Pattingalloang dari beragam sudut pandang. Penelitian Aulya Meidiana Wahda, Najamuddin, dan Bahri (2020) menguraikan peran Karaeng Pattingalloang sebagai raja, mangkubumi, sekaligus ilmuwan yang memberikan sumbangsih terhadap kemajuan Kerajaan Gowa-Tallo melalui kepemimpinan, diplomas, dan pengembangan ilmu pengetahuan.[5] Sementara itu, Ilham, Mardi Adi Armin, dan M. Syafri Badaruddin (2022) menelaah konsep kepemimpinannya melalui pendekatan sastra dan menyimpulkan bahwa Karaeng Pattingalloang merupakan figur pemimpin yang cerdas, arif, dan bertanggung jawab.[6] Di sisi lain, Ahmad Habib Akramullah dan Syamzan

---

[1]Andi Muhammad Fariedwajdhi dan Andi Nur Fiqhi Utami, 'Sistem Perdagangan Beras Sebagai Komoditi Utama Maritim Di Kerajaan Gowa-Tallo Abad XVI-XVII,Arajang: Jurnal Ilmu Sosial Politik', 6.2 (2023), 2–3.

[2]M. Syafri Badaruddin Ilham, Mardi Adi Armin, 'Dekonstruksi Konsep Kepemimpinan Karaeng Pattingalloang', *Jurnal Ilmu Budaya*, 10.1 (2022), 152–57.

[3]Ilham Daeng Makkelo, 'Sejarah Makassar Dan Tradisi Literasi', *Lembaran Sejarah*, 15.1 (2019), 38–40.

[4]Manyambeang dan Mone, 'Lontarak Patturioloanga Ri Tattalloka (Sejarah Tallo)', 19.

[5]Bahri Aulya Meidiana Wahda, Najamuddin, 'I Mangadacinna Daeng Sitaba Sultan Mahmud Syah Karaeng Pattingngalloang : Raja , Mangkubumi Dan Ilmuwan Abad XVII Aulya Meidiana Wahda , Najamuddin , Bahri', *Jurnal Pemikiran Kesejarahan Dan Pendidikan Sejarah*, 18.2 (2020), 166–76.

[6]Ilham, Mardi Adi Armin.

Syukur (2023) lebih memusatkan perhatian pada kondisi Kerajaan Islam Makassar menjelang masa pemerintahan Karaeng Pattingalloang serta perkembangan Gowa-Tallo sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam.[7]

Walaupun penelitian-penelitian tersebut memiliki ketertarikan dengan kajian ini, sebagian besar masih berfokus pada aspek sejarah politik, proses Islamisasi, dan kepemimpinan secara umum. Kajian yang secara khusus membahas kepemimpinan, etika politik, dan diplomasi Karaeng Pattingalloang secara terpadu dalam persefektif historis masih belum banyak dilakukan.[8] Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis prinsip kepemimpinan, etika politik, serta strategi diplomasi Karaeng Pattingalloang dalam sistem pemerintahan Kerajaan Gowa-Tallo.

Dalam penelitian ini, teori kepemimpinan, etika politik, dan diplomasi digunakan sebagai landasan analisis untuk memahami praktik pemerintahan yang dijalankan oleh Karaeng Pattingalloang. Teori kepemimpinan digunakan untuk menganalisis prinsip, karakter, serta efektifitas kepemimpinan Karaeng Pattingalloang dalam menjalankan pemerintahan Kerajaan Gowa-Tallo Teori ini menjelaskan bahwa kepemimpinan berkaitan dengan perilaku, fungsi, tugas, dan etika seorang pemimpin dalam mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan.[9]

Teori etika politik digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji nilai-nilai moral yang mendasari praktik pemerintahan Karaeng Pattingalloang. Teori ini menekankan bahwa pelaksanaan kekuasaan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip etika, seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, dan orientasi pada kepentingan umum.[10] Dengan menggunakan teori etika politik, penelitian ini berupaya menelaah sejauh mana nilai-nilai tersebut tercermin dalam kebijakan, tindakan, dan pola kepemimpinan Karaeng Pattingalloang dalam menjalankan pemerintahan Kerajaan Gowa-Tallo.

Teori diplomasi digunakan sebagai landasan analisis untuk memahami strategi hubungan politik dan perdagangan yang dijalankan oleh Karaeng Pattingalloang dalam menjaga kepentingan Kerajaan Gowa-Tallo. Teori diplomasi memandang diplomasi sebagai proses komunikasi yang dilakukan untuk membangun hubungan, mencapai kesepakatan, serta memperjuangkan kepentingan suatu negara atau kerajaan tanpa menggunakan kekerasan.[11] Melalui teori ini, penelitian menganalisis bagaimana Karaeng Pattingalloang membangun hubungan dengan berbagai kerajaan dan bangsa asing serta memanfaatkan diplomasi untuk memperkuat posisi Kerajaan Gowa-Tallo dalam Jaringan perdagangan dan politik internasional.

---

[7]Ahmad Habib Akramullah and Syamzan Syukur, 'I Mangadacinna Daeng Sitaba Karaeng Pattingalloang Sultan Mahmud (Kondisi Kerajaan Islam Makassar Menjelang Pemerintahannya)', 11.01 (2023), 74–95.

[8]Anang Setiawan and Erinda Alfiani Fauzi, 'Etika Kepemimpinan Politik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia', *JPK: Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan*, 1.1 (2019), 1–2.

[9]Addurorul Muntatsiroh dan Suswati Hendriani, 'Tipe-Tipe Kepemimpinan Dan Teori Kepemimpinan Dalam Suatu Organisasi,Jurnal Economic Edu 4', 2024, 176.

[10]dan Ida Susilowati Iqbal Maulana Alfiansyah, Sofi Mubarok, Yulia Rimapradesi, Nabila Yasmin Namira, 'Etika Politik Dalam Pandangan Machievelli Dan Al Mawardi," SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i 10,' 10.1 (2023), 128. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.31115>.

[11]Moh. Muhamad Karang Seto, Zelda Nurarin Trianditi Wicaksono, 'Praktik Komunikasi Diplomatik ASEAN Dalam Pertemuan Multilateral: Analisis Teori Diplomasi Dan Bahasa Diplomasi, Prosiding SNIIS', 2025, 656.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mendeskripsikan prinsip kepemimpinan, etika politik, dan strategi diplomasi Karaeng Pattingalloang dalam sistem pemerintahan Kerajaan Gowa-Tallo. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami peran intelektual Karaeng Pattingalloang dalam mendorong kemajuan pemerintahan dan perkembangan peradaban Makassar pada abad ke-17.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan memanfaatkan data kualitatif.[12] Data penelitian diperoleh dari sumber primer berupa Manuskrip *Lontarak Patturioloang ri Tattalloka*, sedangkan sumber sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian. Tahapan penelitian dilakukan melalui heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.[13]

Berdasarkan tahapan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan historis untuk memahami peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan kepemimpinan, etika politik, dan diplomasi Karaeng Pattingalloang dalam pemerintahan Kerajaan Gowa-Tallo.[14] Pendekatan ini memungkinkan penelitian menelaah berbagai fakta sejarah secara kritis melalui analisis sumber-sumber yang tersedia sehingga diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai peran Karaeng Pattingalloang dalam perkembangan kerajaan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kepemimpinan untuk menganalisis karakter, kebijakan, dan prinsip-prinsip kepemimpinan yang diterapkan Karaeng Pattingalloang. Pendekatan ini membantu menjelaskan bagaimana ia menjalankan pemerintahan, mengambil keputusan, serta membangun hubungan dengan masyarakat dan elite kerajaan.

Selanjutnya, pendekatan diplomasi digunakan untuk mengkaji strategi hubungan yang dibangun Karaeng Pattingalloang dengan berbagai bangsa dan kerajaan lain. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menjelaskan peran diplomasi dalam memperkuat posisi Kerajaan Gowa-Tallo sebagai pusat perdagangan dan kekuatan politik di kawasan timur Nusantara pada abad ke-17.

Hasil dan Pembahasan

Prinsip Kepemimpinan Karaeng Pattingalloang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Karaeng Pattingalloang memiliki kedudukan strategis dalam struktur pemerintahan Kerajaan Gowa-Tallo pada abad ke-17. Selain menjabat sebagai Raja Tallo, ia juga berperan sebagai Mangkubumi yang mendampingi pemerintahan Sultan Malikussaid pada tahun 1639-1654, sehingga memiliki pengaruh besar dalam penyelangaraan pemerintahan dan pengambilan kebijakan kerajaan.[15]

---

[12]Rita Kumala Sari, 'Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia', Jurnal Borneo Humaniora, 1.2 (2021), 60.

[13]Wulan Juliani Sukmana, 'Metode Penelitian Sejarah', *Seri Publikasi Pembelajaran*, 1.2 (2021), 3.

[14]Putri Maharini and others, 'Pendekatan Historis Dan Pendekatan Filosofis Dalam Studi Islam', *Jurnal JUKIM*, 2.3 (2023), 109.

[15]Andini Perdana, 'Representasi Warisan Karaeng Pattingalloang Di Museum," Pangadereng,' 6.1 (2020), 60.

Dalam *Lontarak Patturioloangari Tutalloka* disebutkan:

> *Areng arakna nikana Solo tan Mahamuareng areng mang'kasarakna iyangku mabassung nikana I Mangngadakcinna, areng Pammanakna ini kana I Balle. Pakkaraenganna nikana Karaeng ri Pattingalloang iyami Tumenanga ri Bontobiraeng.*[16]

Kutipan tersebut memperlihatkan identitas Karaeng Pattingalloang sebagai tokoh penting dalam pemerintahan Kerajaan Gowa-Tallo. Gelar Karaeng ri Pattingalloang dan Tumenanga ri Bontobiraeng menunjukkan statusnya sebagai bangsawan sekaligus pejabat tinggi kerajaan yang memiliki peranan signifikan dalam menjaga stabilitasnya pemerintahan.

Kepemimpinan Karaeng Pattingalloang mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai budaya masyarakat Makassar dan prinsip-prinsip pemerintahan Islam.[17] Penerapan *nilai ade', rapang, bicara, wari,* dan *sara'* dalam sistem pemerintahan menunjukkan bahwa kepemimpinannya dilandasi oleh norma adat dan nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Kepemimpinan pada hakikatnya merupakan proses yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk memengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan anggota organisasi atau masyarakat sehingga tujuan ditetapkan dapat tercapai secara efektif.[18] Dalam Konsep tersebut, Karaeng Pattingalloang mampu menjalankan perannya sebagai pemimpin dengan menjaga stabilitas pemerintahan, memperkuat hubungan antara kerajaan dan masyarakat, serta meningkatkan posisi kerajaan Gowa-Tallo sebagai salah satu kerajaan maritim yang berpengaruh pada abad ke-17.

Selain itu, Karaeng Pattingalloang juga menunjukkan karakter kepemimpinan yang visioner dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta hubungan internasional. Kepemimpinan ditunjukkan melalui kemampuan seorang pemimpin dalam memengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan masyarakat untuk mewujudkan tujuan yang telah disepakati bersama.[19] Konsep tersebut tercermin dalam kebijakan Karaeng Pattingalloang yang mendukung perdagangan internasional, pengembangan ilmu pengetahuan, serta hubungan diplomatik dengan berbagai bangsa, Melalui kebijakan-kebijakan tersebut, ia mampu mengarahkan perkembangan Kerajaan Gowa-Tallo menuju kemajuan politik, ekonomi, dan intelektual. Kemampuannya menguasai beberapa bahasa asing, seperti Portugis dan Spanyol, semakin memperlihatkan kapasitas intelektualnya sebagai pemimpin yang memiliki pandangan luas dalam memajukan kerajaan.[20]

Etika Politik Karaeng Pattingalloang

---

[16]Manyambeang dan Mone.

[17]Andi Tenripadang, 'Aksiologi Budaya Bugis Terhadap Produk Peraturan Daerah Di Parepare', *Kuriositas*, VI.2 (2013), 7–8.

[18]Susan Febriantina dkk., 'Literature Review: Teori-Teori Kepemimpinan (Modern Dan Tradisional),Journal of Student Research 3', 2025, 47.

[19]Ilhamuddin Nukman, 'Tantangan Kepemimpinan: Pengantar Menelusuri Konsep Kepemimpinan Indigenous,Jurnal Psikoislamika', 11 (2014), 15–16.

[20]Zofrano Ibrahimsyah, Magribi Sultani, and Raisa Rahmawati, 'ABORIGIN YOLNGU SEBAGAI DIPLOMASI DAN PERDAGANGAN TRANSNASIONAL ABAD XVII-XIX M', *Sejarah Dan Budaya*, 13.1 (2019), 124 <https://doi.org/10.17977/um020v13i12019p107>.

Etika politik Karaeng Pattingalloang tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang mengutamakan kepentingan kerajaan dan kesejahteraan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Dalam menjalankan pemerintahan, ia tetap mempertimbangkan adat istiadat serta nilai-nilai sosial masyarakat Makassar dalam proses pengambilan keputusan politik.

Nilai *siri'na pacce* yang menekankan kehormatan diri, solidaritas, dan kepedulian sosial tercermin dalam kepemimpinannya.[21] Prinsip tersebut terlihat dari upayanya menjaga kehormatan kerajaan sekaligus membangun hubungan yang harmonis dengan rakyat dan para pemimpin adat. Menurut Franz Magnis Suseno, etika politik berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban moral dalam penggunaan kekuasaan untuk menegakkan keadilan, menciptakan ketenteraman, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.[22] Dalam konteks ini, kebijakan Karaeng Pattingalloang menunjukkan orientasi pada stabilitas kerajaan, kepentingan masyarakat, dan terciptanya kehidupan sosial yang harmonis.

Kebijakan perdagangan bebas yang diterapkannya mencerminkan adanya prinsip keterbukaan dan keadilan dalam bidang ekonomi. Ia memberikan kesempatan kepada para pedagang dari berbagai bangsa untuk melakukan aktivitas perdagangan di Makassar tanpa membedakan latar belakang suku, agama, maupun asal negara. Sikap tersebut menunjukkan bahwa praktik politik yang dijalankannya didasarkan pada prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap keberagaman.

Dalam menghadapi VOC Belanda, Karaeng Pattingalloang memperlihatkan sikap politik yang tegas terhadap upaya monopoli perdagangan. Penolakannya terhadap sistem tersebut menunjukkan komitmennya dalam mempertahankan kedaulatan politik dan ekonomi Kerajaan Gowa-Tallo,[23] serta melindungi kepentingan masyarakat dari dominasi kekuatan asing.

Selain itu, etika politik Karaeng Pattingalloang juga tercermin dalam hubungannya dengan keluarga dan orang tua. Dalam budaya makassar, penghormatan kepada orang tua merupakan bagian penting dari nilai moral dan adat istiadat. Sikap hormat, patuh, serta menjaga nama baik keluarga menjadi dasar pembentukan karakter seorang pemimpin. Nilai tersebut memengaruhi cara Karaeng Pattingalloang menjalankan pemerintahan dengan penuh tanggung jawab, bijaksana, dan tetap menjungjung tinggi martabat keluarga serta kerajaan. Hubungan yang baik dengan orang tua dan keluarga juga memperkuat nilai *siri'na pacce* dalam dirinya, sehingga ia tidak hanya dihormati sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai tokoh yang memiliki etika dan moral yang kuat dalam kehidupan sosial masyarakat Makassar.

Diplomasi Karaeng Pattingalloang Dalam Hubungan Internasional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Karaeng Pattingalloang memiliki kemampuan diplomasi yang baik dalam menjalin hubungan dengan berbagai bangsa asing. Melalui kebijakan keterbukaan perdagangan dan hubungan politik yang luas, Kerajaan Gowa-Tallo

---

[21]Rizal Darwis dan Asna Usman Dilo, 'Implikasi Falsafah Siri' Na Pacce Pada Masyarakat Suku Makassar Di Kabupaten Gowa,El Harakah,' 14.2, 190–91.

[22]Wahyu Trisno Aji, 'Dasar-Dasar Etika Politik Franz Magnis Suseno,Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial', 3.4 (2024), 176.

[23]Khaeruddin, 'Dinamika Politik Kerajaan-Kerajaan Lokal Di Sulawesi Selatan: Dari Persekutuan Diplomasi Hingga Konfrontasi Perebutan Superioritas (Abad XV–XVII)', *Yupa: Historical Studies Journal*, 6.2 (2022), 119–20 <https://doi.org/10.30872/yupa.v6i2.1325>.

mampu membangun kerja sama dengan berbagai bangsa Eropa serta memperoleh keuntungan dalam bidang perdagangan dan diplomasi.[24]

Menurut Jan Melissen, diplomasi publik merupakan upaya membangun dan mengelola hubungan dengan masyarakat asing melalui komunikasi, interaksi, dan kerja sama yang berkelanjutan guna menciptakan saling pengertian serta mendukung pencapaian kepentingan suatu negara.[25] Prinsip tersebut tercermin dalam strategi diplomasi Karaeng Pattingalloang yang tetap menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak tanpa mengabaikan kepentingan dan kedaulatan Kerajaan Gowa-Tallo.

Kebijakan perdagangan bebas yang diterapkannya berhasil menjadikan Makassar sebagai pelabuhan internasional sekaligus pusat perdagangan di kawasan timur Nusantara. Pedagang dari berbagai wilayah, seperti Melayu, jawa, Arab, India, Cina, hingga Eropa, dapat melakukan kegiatan perdagangan secara terbuka. Kondisi ini memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi kerajaan serta memperkuat posisi Makassar dalam jaringan perdagangan internasional.

Geoffrey R. Berridge, menjelaskan bahwa diplomasi merupakan instrumen yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan luar negeri suatu negara. Melalui diplomasi, negara berupaya mencapai kepentingan nasional dan tujuan politiknya tanpa menggunakan kekerasan, melainkan melalui komunikasi, negosiasi, dan hubungan antarnegara.[26] Dalam hal ini, diplomasi Karaeng Pattingalloang berperan penting dalam memperkuat posisi Kerajaan Gowa-Tallo ketika menghadapi tekanan politik dan ekonomi dari VOC Belanda.

Selain berkaitan dengan perdagangan, diplomasi yang dijalankan Karaeng Pattingalloang juga mencakup pertukaran ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Melalui interaksi dengan bangsa-bangsa Eropa, ia memperoleh berbagai pengetahuan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan Barat. Ketertarikannya yang besar terhadap ilmu pengetahuan menjadikannya dikenal sebagai salah satu tokoh intelektual Nusantara pada abad ke-17.[27] Keterbukaannya terhadap berbagai perkembangan dari dunia luar menunjukkan bahwa Karaeng Pattingalloang merupakan pemimpin yang memiliki wawasan luas serta berorientasi pada kemajuan peradaban.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa Karaeng Pattingalloang merupakan salah satu tokoh penting dalam pemerintahan Kerajaan Gowa-Tallo yang menerapkan kepemimpinan dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya Makassar, ajaran Islam, serta keterbukaan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Kepemimpinannya tidak semata-mata berfokus pada penggunaan kekuasaan, tetapi juga ditandai oleh visi yang jauh ke depan,

---

[24]Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, 'Invasi Kerajaan Gowa Terhadap Kerajaan Soppeng Tahun 1609', *Jurnal Walasuji*, 8.1 (2017), 19.

[25]Zulfikhar Raditya Putra dan Hasan Sidik, 'Diplomasi Publik Indonesia Melalui Desa Wisata Kalibiru Terhadap Wisatawan Asing', *Padjadjaran Journal of International Relations,* 1.2 (2019), 160–61 <https://doi.org/10.24198/padjir.v1i2.>.

[26]Nurul Faizah Al Khoiriyah, 'Diplomasi Komersial Indonesia Di Era Digital Melalui Next Indonesia Unicorn (NextICorn)', *SIYAR Journal,* 1.1 (2021), 89.

[27]Aswar, Handi Nurdiawan, dan Dian Cahyadi, 'Perancangan Website Ensiklopedia Digital Karaeng Pattingalloang', *Jurnal Pakarena,* 2.2 (2018), 60.

kecakapan intelektual, serta tanggung jawab dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari aspek etika politik, Karaeng Pattingalloang menjalankan pemerintahan dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, musyawarah, dan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Nilai budaya *siri'na pacce* turut menjadi pedoman moral dalam setiap kebijakan yang diambil. Penolakannya terhadap monopoli perdagangan yang diterapkan VOC mencerminkan upayanya dalam mempertahankan kedaulatan politik dan ekonomi Kerajaan Gowa-Tallo.

Sementara itu, dalam bidang diplomasi, Karaeng Pattingalloang mampu membangun hubungan dengan berbagai bangsa di Asia dan Eropa melalui pendekatan yang menekankan kerja sama, kesetaraan, dan keterbukaan perdagangan. Kebijakan tersebut berkontribusi dalam menjadikan Makassar sebagai salah satu pusat perdagangan internasional di kawasan timur Nusantara, sekaligus membuka ruang bagi pertukaran ilmu pengetahuan dan budaya yang mendukung kemajuan peradaban Makassar.

Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa Karaeng Pattingalloang bukan hanya berperan sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai intelektual dan diplomat yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan Kerajaan Gowa-Tallo pada abad ke-17. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi lebih lanjut pemikiran dan kontribusi intelektual Karaeng Pattingalloang melalui kajian terhadap berbagai sumber lokal maupun asing agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai perannya dalam sejarah Nusantara.

Daftar Pustaka

Addurorul Muntatsiroh dan Suswati Hendriani, 'Tipe-Tipe Kepemimpinan Dan Teori Kepemimpinan Dalam Suatu Organisasi,Jurnal Economic Edu 4', 2024, 176

Akramullah, Ahmad Habib, and Syamzan Syukur, 'I MANGADACINNA DAENG SITABA KARAENG PATTINGALLOANG SULTAN MAHMUD (KONDISI KERAJAAN ISLAM MAKASSAR MENJELANG PEMERINTAHANNYA)', 11 (2023), 74–95

Andi Muhammad Fariedwajdhi dan Andi Nur Fiqhi Utami, 'Sistem Perdagangan Beras Sebagai Komoditi Utama Maritim Di Kerajaan Gowa-Tallo Abad XVI-XVII,Arajang: Jurnal Ilmu Sosial Politik', 6 (2023), 2–3

Andini Perdana, 'Representasi Warisan Karaeng Pattingalloang Di Museum," Pangadereng,' 6 (2020), 60

Aulya Meidiana Wahda, Najamuddin, Bahri, 'I Mangadacinna Daeng Sitaba Sultan Mahmud Syah Karaeng Pattingngalloang : Raja , Mangkubumi Dan Ilmuwan Abad XVII Aulya Meidiana Wahda , Najamuddin , Bahri', *Jurnal Pemikiran Kesejarahan Dan Pendidikan Sejarah*, 18 (2020), 166–76

Handi Nurdiawan, Dian Cahyadi, dan Aswar, 'Perancangan Website Ensiklopedia Digital Karaeng Pattingalloang', *Jurnal Pakarena,* 2 (2018), 60

Ibrahimsyah, Zofrano, Magribi Sultani, and Raisa Rahmawati, 'ABORIGIN YOLNGU SEBAGAI DIPLOMASI DAN PERDAGANGAN TRANSNASIONAL ABAD XVII-XIX M', *Sejarah Dan Budaya*, 13 (2019), 124 <https://doi.org/10.17977/um020v13i12019p107>

Ilham, Mardi Adi Armin, M. Syafri Badaruddin, 'Dekonstruksi Konsep Kepemimpinan Karaeng Pattingalloang', *JURNAL ILMU BUDAYA*, 10 (2022), 152–57

Ilhamuddin Nukman, 'Tantangan Kepemimpinan: Pengantar Menelusuri Konsep Kepemimpinan Indigenous,Jurnal Psikoislamika', 11 (2014), 15–16

Iqbal Maulana Alfiansyah, Sofi Mubarok, Yulia Rimapradesi, Nabila Yasmin Namira, dan Ida Susilowati, 'Etika Politik Dalam Pandangan Machievelli Dan Al Mawardi," SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i 10,' 10 (2023), 128. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.31115>

Khaeruddin, 'Dinamika Politik Kerajaan-Kerajaan Lokal Di Sulawesi Selatan: Dari Persekutuan Diplomasi Hingga Konfrontasi Perebutan Superioritas (Abad XV–XVII)', *Yupa: Historical Studies Journal*, 6 (2022), 119–20 <https://doi.org/10.30872/yupa.v6i2.1325>

Maharini, Putri, Silva Lestari Hasibuan, Mickael Halomoan Harahap, and Article History, 'Pendekatan Historis Dan Pendekatan Filosofis Dalam Studi Islam', *Jurnal JUKIM,* 2 (2023), 109

Makkelo, Ilham Daeng, 'Sejarah Makassar Dan Tradisi Literasi', *Lembaran Sejarah*, 15 (2019), 38–40

Manyambeang dan Mone, 'Lontarak Patturioloanga Ri Tattalloka (Sejarah Tallo)', 19

Muhamad Karang Seto, Zelda Nurarin Trianditi Wicaksono, Moh., 'Praktik Komunikasi Diplomatik ASEAN Dalam Pertemuan Multilateral: Analisis Teori Diplomasi Dan Bahasa Diplomasi, Prosiding SNIIS', 2025, 656

Nurul Faizah Al Khoiriyah, 'Diplomasi Komersial Indonesia Di Era Digital Melalui Next Indonesia Unicorn (NextICorn)', *SIYAR Journal,* 1 (2021), 89

Rita Kumala Sari, 'Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia', *Jurnal Borneo Humaniora,* 1 (2021), 60

Rizal Darwis dan Asna Usman Dilo, 'Implikasi Falsafah Siri' Na Pacce Pada Masyarakat Suku Makassar Di Kabupaten Gowa,El Harakah,' 14, 190–91

Setiawan, Anang, and Erinda Alfiani Fauzi, 'Etika Kepemimpinan Politik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia', *JPK: Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan*, 1 (2019), 1–2

Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, 'Invasi Kerajaan Gowa Terhadap Kerajaan Soppeng Tahun 1609', *Jurnal Walasuji*, 8 (2017), 19

Susan Febriantina dkk., 'Literature Review: Teori-Teori Kepemimpinan (Modern Dan Tradisional),Journal of Student Research 3', 2025, 47

Tenripadang, Andi, 'Aksiologi Budaya Bugis Terhadap Produk Peraturan Daerah Di Parepare', *Kuriositas,* VI (2013), 7–8

Wahyu Trisno Aji, 'Dasar-Dasar Etika Politik Franz Magnis Suseno,Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial', 3 (2024), 176

Wulan Juliani Sukmana, 'Metode Penelitian Sejarah', *Seri Publikasi Pembelajaran*, 1 (2021), 3

Zulfikhar Raditya Putra dan Hasan Sidik, 'Diplomasi Publik Indonesia Melalui Desa Wisata Kalibiru Terhadap Wisatawan Asing', *Padjadjaran Journal of International Relations,* 1 (2019), 160–61 <https://doi.org/10.24198/padjir.v1i2.>